

USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN BIRO HUKUM TAHUN 2018

**DISAMPAIKAN DALAM FORUM SKPD
MARET 2017**

**OLEH :
BIRO HUKUM SETDA DIY**

ISU TEMATIK PEMBANGUNAN 2018



- ▶ Penurunan Ketimpangan Wilayah
- ▶ Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Ketimpangan Pendapatan
- ▶ Tindak Lanjut Pembangunan New Yogyakarta International Airport
- ▶ Peran Swasta dalam Pembiayaan Pembangunan

ARAH KEBIJAKAN SESUAI ISU TEMATIK: Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Ketimpangan Pendapatan



- ▶ Pada Prolegda 2017 akan disusun Raperda Industri Kreatif dan UMKM
- ▶ Pada 2018 akan disusun Rapergub tindak lanjut Perda Industri Kreatif dan UMKM
- ▶ Pada 2018 akan disusun Buku Pedoman Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum bagi Penyandang Disabilitas

ARAH KEBIJAKAN SESUAI ISU TEMATIK: Tindak Lanjut Pembangunan Bandara



- ▶ Pada Prolegda 2017 akan disusun Raperda Tata Ruang
- ▶ Pada tahun 2018 akan disusun Rapergub tindak lanjut Perda Tata Ruang

ARAH KEBIJAKAN SESUAI ISU TEMATIK: Peran Swasta dalam Pembiayaan Pembangunan



- ▶ Telah ditetapkan Perda No. 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan
- ▶ Pada tahun 2018 akan disusun Rapergub tindak lanjut Perda No. 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan

SASARAN STRATEGIS DAN INDIKATOR



- ▶ **Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas produk hukum daerah**
 - Indikator: Persentase jumlah produk hukum daerah (perda, perdais, perda kabupaten/kota, dan pergub) yang sesuai kewenangan, tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan kekhususan DIY
- ▶ **Sasaran 2 : Meningkatnya kualitas pelayanan bantuan hukum dan layanan informasi hukum**
 - Indikator: Persentase pelayanan bantuan hukum dan informasi hukum yang mudah diakses

KEBIJAKAN SASARAN 1:

Meningkatnya kualitas produk hukum daerah

- Melaksanakan harmonisasi produk hukum daerah sesuai dengan kewenangan, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan kekhususan DIY
- Meningkatkan peran Biro Hukum dalam memfasilitasi pembentukan produk hukum daerah kabupaten/kota melalui proses konsultasi, fasilitasi, evaluasi, dan penomoran registrasi
- Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia antara lain perancang peraturan perundang-undangan melalui diklat fungsional perancang peraturan perundang-undangan



KEBIJAKAN SASARAN 2:

Meningkatnya kualitas pelayanan bantuan hukum dan layanan informasi hukum

- Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam rangka pelayanan hukum
- Pemenuhan sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan layanan hukum melalui teknologi informasi
- Meningkatkan kesadaran hukum dan Hak Asasi Manusia bagi pemerintah kabupaten / kota



PROGRAM DAN INDIKATOR PROGRAM



No	Program	Indikator Program
1	Penataan Peraturan Perundang-undangan	Persentase jumlah rancangan produk hukum yang terselesaikan
2	Pengembangan Regulasi Urusan Keistimewaan	Persentase jumlah rancangan produk hukum yang terselesaikan
3	Pengawasan Produk Hukum	Persentase hasil konsultasi, fasilitasi, dan evaluasi rancangan produk hukum daerah kabupaten / kota ditambah persentase hasil pengkajian rancangan produk hukum daerah kabupaten kota dibagi dua
4	Pelayanan Bantuan Hukum	Persentase jumlah pemberian pelayanan bantuan hukum dan informasi hukum

KEGIATAN 2018



No	Program	Kegiatan	Target
1	Penataan Peraturan Perundang-undangan	Legislasi Rancangan Produk Hukum Daerah	<ul style="list-style-type: none">• 10 raperda• 100 rapergub
2	Pengembangan Regulasi Urusan Keistimewaan	Penyusunan Produk Hukum Urusan Keistimewaan	3 rapergub tindak lanjut perda
3	Pengawasan Produk Hukum	Pengawasan Produk Hukum Kabupaten / Kota	100 rancangan produk hukum (perda/ perwal/perbub) kabupaten / kota
4	Pelayanan Bantuan Hukum	Penyelesaian Permasalahan Hukum	<ul style="list-style-type: none">• 2 kali pelayanan bantuan hukum litigasi dan 1 kali pelayanan bantuan hukum nonlitigasi• Koordinasi dengan Kanwil Hukum dan HAM terkait pemberian bantuan hukum kepada orang miskin

KEGIATAN 2018



No	Program	Kegiatan	Target
4	Pelayanan Bantuan Hukum	Penyebarluasan dan Digitalisasi Produk Hukum	<ul style="list-style-type: none">• 2800 Buku Informasi Peraturan Perundang-undangan• 2800 Buku Lembaran Daerah dan Berita Daerah• 260 produk hukum yang diunggah (<i>upload</i>) ke dalam website Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum• 1 kali koordinasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum se-DIY• 1 kali Legal Expo



Terima
kasih